

## DAFTAR PUSTAKA

- Amirrudin, Muhammadiyah, Azikin, R. 2012. Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Pertasi Kencana Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 11(1): 17-31.
- Arifianto, D.F. 2014. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* 2(3): 473-485.
- Bastian, I. 2015. *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*. Erlangga. Jakarta.
- Bungin, B. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Kencana. Jakarta
- Dwiharja, L.M dan T. Kurrohman. 2014. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) terhadap Partisipasi Komite Sekolah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* 1(3): 182-194.
- Faridah, 2015. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 4(5): 1-20.
- Halim, A. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Harun. 2009. *Reformasi Akuntansi dan Manajemen Sektor Publik di Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.
- Hasniati. 2016. Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik* 2(1): 15-30.
- Kristiaten. 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kumalasari, D. 2016. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 5(11): 1-15.
- Kuncoro, M. 2009. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Erlangga, Jogjakarta.

- LAN & BPKP. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Penerbit LAN.
- Lestari, A.K.D, A.T. Atmaja, dan I.M.P. Adiputra. 2014. Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Prakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. *Jurnal Akuntansi* 2(1): 1-12.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. UII Press. Yogyakarta.
- Mamesah. 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Nafidah, N.L. dan M. Suryaningtyas. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat . *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3(1): 214-239.
- Nazir, M. 2011. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 *Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta.
- Purhantara, W. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Prabawa, A. 2015. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan di Desa Loa Keputusan Kecamatan Tenggarong seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3(1): 227-238.
- Sa'adah, B. 2015. Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran melalui E-GOVERNMENT. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* 3(2): 1-15.
- Sangadji, E.F dan Sopiah. 2010. *Metodologi Penelitian- Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. ANDI. Yogyakarta.

- Sari, R.M. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Komplek* 7(2): 139-148.
- Siagian, S. P. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sudriamunawar dan Haryono. 2002. *Pengantar Study Administrasi Pembangunan*. Bandung: Mandar Maju.
- Sulistiyani, A.T. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Gava media. Yogyakarta.
- Sumarsono, S. 2010. *Manajemen Keuangan Pemerintahan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Sumpeno, W. 2015. *Perencanaan Desa Terpadu*. Read. Banda Aceh.
- Sunyoto, D. 2013. *Metode Penelitian Akuntansi*. Regulasi Aditama. Bandung.
- Supheni, I. 2016. Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nganjuk* 11(2): 191-199.
- Ulum, I. 2004. *Akuntansi Sektor Publik; Sebuah Pengantar*. UMM Press. Malang.
- Umami, R. dan I. Nurodin. 2017. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi* 6(11): 74-80.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah 15 Oktober 2004. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125*. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Desa. 15 Januari 2014. Jakarta.
- Yahya, I. 2006. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Sistem Teknik Industri* 7(4): 27-29.